

KONTRIBUSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MINAT DAN BUDAYA BACA PADA MASYARAKAT MISKIN

Oleh. Drs. Hari Santoso, S.Sos.¹

Abstraks. Dampak kemiskinan yang terjadi di Indonesia , diantaranya : (1) Tingginya tingkat pengangguran, (2) Tingginya tingkat kriminalitas , pelacuran dan gelandangan yang disebabkan efek pengangguran, (3) Rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. (4) Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat sehingga berdampak pada tingginya tingkat kematian (5) Rawan terjadinya konflik sosial bernuansa SARA karena ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi kemiskinan yang semakin hari semakin akut.

Tujuan Penyelenggaraan TBM dimaksudkan untuk menyediakan akses sarana pembelajaran yang menyediakan dan memberi layanan bahan bacaan yang merata, meluas, dan terjangkau oleh masyarakat dengan mudah dan murah. Adapun tujuannya adalah: (1) Meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca, (2) Menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca, (3) Membangun masyarakat membaca dan belajar, (4) Mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, (5) Mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya maju, dan beradab.

Hasil yang diharapkan dari pemberian bantuan TBM ini adalah:(1) Memperluas akses TBM sampai tingkat kecamatan, (2) Meningkatnya mutu perlengkapan dan peralatan sebagai sarana kelembagaan TBM, (3) Meningkatnya jumlah koleksi dan variasi judul bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (4) Meningkatnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, (5) Meningkatnya kegiatan pembudayaan kegemaran membaca, (6) Adanya produk unggulan sesuai dengan potensi lokal yang dapat dikembangkan dan diberdayakan oleh masyarakat secara ekonomi.

Layanan yang dapat diberikan TBM adalah: (1) Layanan taman bacaan masyarakat secara elektronik (2) Membaca ditempat, (3) Meminjamkan buku, (4) Pembelajaran (5) Praktek keterampilan, (6) Kegiatan Literasi. (7) Melaksanakan lomba-lomba.

Untuk mendorong masyarakat mau dan mampu membaca dilakukan dengan dengan berbagai kiat, yaitu : (1) Mengenali masyarakat dan berbagai kebutuhannya, (2) Melakukan sosialisasi TBM (3) Membentuk kelompok sasaran berdasarkan kemampuan baca/kebutuhan. (4) Membimbing dan meningkatkan kemampuan baca kelompok sasaran, (5) Menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat.

Kata kunci : Kemiskinan, Minat baca, Taman Bacaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dampak kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah sosial, tetapi juga menyangkut semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Dari data yang dikeluarkan BPS pada bulan September 2012, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen). Meskipun angka tersebut cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah angka kemiskinan tersebut masih tergolong cukup besar.

¹ Penulis adalah Pustakawan Madya
pada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang

Dalam aspek pendidikan, pada tahun 2011 jumlah penduduk buta aksara usia 15–59 tahun berjumlah 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa keberaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Kegiatan Perluasan dan Penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan keaksaraan melalui Taman Bacaan Masyarakat. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pemerintah dengan berbagai pihak yang terkait juga melakukan berbagai upaya mengatasi kemiskinan dengan membangun mentalitas bangsa, meningkatkan keterampilan, menyediakan berbagai lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran, mengendalikan jumlah penduduk dan membuat kebijakan agar setiap warga negara memperoleh akses dalam bidang pendidikan sehingga upaya mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan

kehidupan bangsa bisa diwujudkan. Oleh sebab itu kehadiran TBM sebagai pusat dokumentasi, edukasi, informasi, sarana rekreasi dan literasi diharapkan bisa menjadi fasilitator bahkan menjadi *learning center* bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Problematika Kemiskinan di Indonesia

Seperti diketahui bahwa strategi pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi atau *growth oriented strategy*. Strategi tersebut memusatkan pada investasi modal luar negeri yang cukup besar di dalam satu atau beberapa faktor seperti industri dan pertambangan, sedangkan pemerintah mengarahkan modal pada sektor pedesaan. Bantuan luar negeri memang berhasil meningkatkan ekonomi Indonesia tetapi jurang kemiskinan di antara golongan penduduk tetap melebar. Ini berarti bahwa *growth oriented strategy* belum mampu mengadakan pemerataan pendapatan (*redistribution of in come*), mengatasi ketimpangan-ketimpangan pendapatan, serta mengurangi kemiskinan. Begitu pula belum dapat menyediakan lapangan kerja yang meluas guna mengatasi pengangguran.

Santoso (1992) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian, sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat (penduduknya) berada pada standar hidup yang rendah. Pada kajian ini standar hidup rendah yang digolongkan penduduk miskin dikonotasikan sebagai rumah tangga penduduk tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Batasan tersebut mengukur kemiskinan dari aspek pendapatan masyarakat yang rendah dan hal tersebut didukung oleh Todaro (2000) dari sudut pandang ekonomi makro yang secara komprehensif menjabarkan kondisi kemiskinan sebagai standar hidup yang rendah dimanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk pendapatan yang rendah (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, sedikit atau tidak berpendidikan, angka kematian yang tinggi, harapan hidup dan mendapatkan pekerjaan yang rendah dan dalam banyak hal mereka berada dalam keadaan yang sulit dan tidak mempunyai harapan sama sekali.

Disamping sudut pandang ekonomi makro, kemiskinan secara konseptual bisa dipandang dari berbagai segi, diantaranya segi subsistem, ketidakmerataan penghasilan dan segi eksternal seperti yang diungkapkan Soerjani (1987), yaitu *pertama* dari segi subsistem dimana penghasilan dan jerih payah seseorang hanya pas-pasan untuk dimakan saja, atau bahkan tidak cukup. *Kedua* segi ketidakmerataan menekankan pada posisi relatif dari setiap golongan menurut penghasilannya terhadap posisi golongan yang lain. Ketiga dari segi

eksternal mencerminkan konsekuensi sosial dari kemiskinan terhadap masyarakat di sekelilingnya. *Ketiga* konsep di atas merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan.

Dari segi subsistem, Suparlan (1984) menjabarkan kemiskinan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dari aspek ekonomi, Esmara (1986) memandang kemiskinan sebagai suatu gejala yang ada pada penduduk miskin yang berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Jadi kemiskinan dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan individu atau sekelompok individu untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi kehidupan sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan.

Dari segi ketidakmerataan, ada dua pandangan tentang kemiskinan, yaitu kemiskinan dipandang dari segi proses dan kemiskinan dipandang sebagai suatu akibat fenomena di dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Agus Pakpahan dan Hermanto (dalam Dillon, 1993) bahwa sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumberdaya dan dana yang ada secara adil kepada anggota masyarakat. Dengan demikian kemiskinan dapat dipandang pula sebagai salah satu akibat dari kegagalan kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat (kemiskinan relatif/struktural). Sedangkan kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala dari suatu fenomena atau gejala dari suatu masyarakat melahirkan konsep kemiskinan absolut. Jika distribusi sumberdaya dan dana yang ada di masyarakat terjadi ketidakadilan, maka sebagian anggota masyarakat yang posisinya lemah akan menerima bagian kekayaan yang kecil dan akan menjadi miskin serta memiliki posisi yang lemah dalam menentukan pembagian kekayaan di dalam masyarakat.

Sedangkan dari segi eksternal, kemiskinan yang berlarut-larut akan mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habis-habisnya, baik bagi orang miskin itu sendiri, masyarakat sekitarnya serta dampak sosial lainnya. Sinaga (dalam Santoso 1992) mendiskripsikan kemiskinan sebagai berikut : kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah (*natural poverty*) dan kemiskinan buatan (*artificial poverty*). Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Sedangkan kemiskinan buatan lebih erat hubungannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu sendiri. Kemiskinan buatan terjadi karena kelembagaan-kelembagaan yang

ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Dari aspek sosiologis, Soemardjan (dalam Santoso,1992), membagi kemiskinan menjadi dua golongan, yaitu kemiskinan individu, yaitu kemiskinan yang dialami oleh seorang individu karena dia malas bekerja atau oleh karena dia terus menerus sakit; dengan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pada dasarnya kemiskinan adalah merupakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang secara sosial ekonomis berada pada standar hidup yang rendah. Standar hidup yang rendah tersebut disebabkan oleh beberapa variabel, diantaranya rendahnya sumber daya alam, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya penguasaan modal, keterbelakangan teknologi, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penyebaran penduduk yang tidak merata, maupun sistem kelembagaan dan atau pranata sosial yang tidak menjamin adanya pemerataan pendapatan dan atau keadilan sosial bagi masyarakatnya.

Kemiskinan memiliki ciri-ciri khusus dimana antara ahli satu dengan lainnya mempunyai cara pandang yang berbeda. Perbedaan cara pandang mengenai ciri-ciri kemiskinan tersebut dilatarbelakangi oleh pendekatan yang berbeda, namun substansinya tetap sama. Berdasarkan pada ukuran penetapan garis kemiskinan, Salim (1982) mengemukakan bahwa ciri-ciri penduduk di bawah garis kemiskinan sebagai berikut : (1) tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan, (2) tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, (3) tingkat pendidikan rendah, tidak tamat SD, (4) kebanyakan mereka tinggal di desa, dan (5) banyak di antara mereka yang tinggal di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (skill) atau pendidikan yang memadai.

Hal serupa juga dikemukakan lebih komprehensif oleh Yusuf (dalam Sumardi, 1982) bahwa ciri-ciri kemiskinan, yaitu : (1) kekurangan nilai gizi makanan jauh di bawah normal/bukan kurang makan, (2) hidup yang morat-marit, (3) kondisi kesehatan yang menyedihkan, (4) pakaian selalu kumal dan tak teratur, (5) tempat tinggal yang jauh dari memenuhi syarat-syarat kebersihan dan kesehatan (sempit, pengap dan kotor), serta (6) tidak mampu mendapatkan pendidikan formal/non formal (ketiadaan biaya dan lemah kecerdasan).

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan mengetahui dan memahami sebab-sebab kemiskinan itu terjadi. Beberapa ahli memberikan pandangan dari sudut pandangan yang berbeda tentang sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Dari aspek manajemen ekonomi Erwidodo (1993) mengemukakan salah satu penyebab kemiskinan adalah adanya " *miss management* " sumber daya sehingga sistem perekonomian tidak berhasil mengalokasikan manfaat sumber daya tersebut secara efisien diantara pelaku ekonomi.

Secara lebih rinci hal serupa juga dikemukakan oleh Soerjani (1987) yang mengungkapkan bahwa empat hal yang menjadi sumber pokok penyebab kemiskinan, yang dalam kenyataannya kait- mengkait, yaitu : (1) mentalitas si miskin itu sendiri, (2) minimnya keterampilan yang dimilikinya, (3) ketidakmampuannya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan, dan (4) peningkatan jumlah penduduk yang relatif berlebihan. Dari aspek ekonomi makro, Hadiwigeno (1993) menegaskan bahwa penyebab kemiskinan secara sistematis dapat digolongkan menjadi 4 katagori, yaitu : (1) sumber daya alam, meliputi : lahan kurang subur, pendayagunaan lahan kurang serta degradasi lahan, (2) teknologi dan unsur pendukungnya meliputi : aplikasi teknologi rendah, ketersediaan sarana produksi terbatas, hama penyakit, (3) sumber daya manusia meliputi : tingkat pendidikan rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat kesehatan masyarakat rendah, tradisi yang menghambat, lapangan kerja terbatas, dan (4) sarana, prasarana dan kelembagaan meliputi : daerah terisolasi, modal terbatas, kelembagaan catur sarana pembangunan pertanian kurang/tidak berfungsi, irigasi terbatas, pemilikan lahan sempit, bagi hasil yang tidak adil, tingkat upah rendah.

Menurut Amartya Sen (dalam Haz, 2001) peraih nobel bidang ekonomi tahun 1998 yang banyak mengkaji masalah kemiskinan mengemukakan bahwa masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah lebih miskin dari pada orang lain dalam suatu masyarakat, melainkan masalah tidak dimilikinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material secara layak dan kegagalan untuk mencapai tingkat " kelayakan minimum tertentu ". Sedangkan jenis kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dibedakan menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan tidak dimilikinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya karena faktor- faktor alamiah seperti cacat, sakit, lanjut usia, bencana alam dan sebagainya sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan materialnya. Mereka miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber

daya manusia maupun sumber daya yang lain. Mereka mendapat imbalan pendapatan yang amat rendah. Kemiskinan struktural lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti redistribusi aset produktif yang tidak efektif, korupsi dan kolusi serta tatanan perekonomian yang timpang atau dengan kata lain kemiskinan yang disebabkan karena hasil pembangunan yang belum seimbang. Pembangunan yang direncanakan melalui bermacam-macam program dan kebijaksanaan yang ditujukan untuk menghilangkan keadaan kemiskinan natural. Namun karena keadaan pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidaksamaan dalam menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata pula. Ketimpangan ini menyebabkan perolehan pendapatan yang tidak seimbang dan menimbulkan ketimpangan struktur masyarakat yang timpang pula. Perbedaan struktur masyarakat yang telah ikut dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal menyebabkan kemiskinan. Sedang kemiskinan kultural atau "kebudayaan kemiskinan" mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya seperti malas, tidak disiplin, boros dan sebagainya, yang dapat ditelaah di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Oscar Lewis (dalam Suparlan, 1984) memperlihatkan bahwa kemiskinan bukanlah semata-mata kekurangan dalam ukuran ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek kebudayaan dan kejiwaan (psikologi) dan hal tersebut diwariskan dari generasi orang tua kepada generasi anak-anak dan seterusnya melalui proses sosialisasi, sehingga bila dilihat dalam perspektif ini kebudayaan kemiskinan tetap lestari.

Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistik dan berciri kapitalisme. Kebudayaan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah melakukan perubahan, penolakan dalam mengikuti perkembangan dan tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sehingga pendapatan mereka rendah menurut ukuran umum/tingkat pendapatan minimum, tetapi mereka tidak mau disebut miskin.

Sedangkan timbulnya kemiskinan bisa bersumber dari berbagai faktor diantaranya adalah rendahnya pendidikan, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat upah yang rendah, kesempatan kerja, inflasi, pajak, investasi, alokasi sumber daya, motivasi bekerja dan sistem budaya sosial serta politik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab

kemiskinan tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga faktor kultural, struktural, sosial dan politik yang kesemuanya saling berkaitan.

Dampak kemiskinan yang terjadi di Indonesia , diantaranya : (1) Tingginya tingkat pengangguran, (2) Tingginya tingkat kriminalitas , pelacuran dan gelandangan yang disebabkan efek pengangguran, (3) Rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. (4) Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat sehingga berdampak pada tingginya tingkat kematian (5) Rawan terjadinya konflik sosial bernuansa SARA karena ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi kemiskinan yang semakin hari semakin akut. Hal tersebut dipertegas oleh Ardhana (1993) bahwa orang miskin adalah kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber daya material maupun intelektual yang memadai/terbatas dan karena keterbatasannya itu, timbul sifat pasif, malas, fatalistik (percaya bahwa kejadian ditentukan oleh nasib), statis dan sikap yang mudah menyerah. Keadaan demikian menyebabkan kreatifitas, kewiraswastaan, pengambilan inisiatif menjadi terpendam dan sulit dikembangkan. Hal tersebut menimbulkan dampak sosial lainnya seperti semakin meningkatnya kriminalitas, pelacuran, gelandangan dan sebagainya.

Selama ini pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, bantuan prasarana dan sarana pertanian, bantuan kredit usaha bagi masyarakat miskin dan bantuan prasarana permukiman kumuh perkotaan. Namun demikian upaya penanggulangan kemiskinan tersebut lebih condong pada pengembangan proyek-proyek sektoral dan pelaksanaannya di lapangan kurang terintegrasi. Sementara itu berbagi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali tidak berpihak kepada kebutuhan mendasar yang diinginkan oleh masyarakat miskin atau bahkan dapat menyebabkan terjadinya proses pemiskinan.

Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut pada dasarnya dilaksanakan melalui : (a) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan (b) Pengurangan pengeluaran masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Langkah-langkah desentralisasi yang sangat signifikan adalah diberlakukannya Otonomi Daerah sejak tahun 2001 akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk maskin mendorong upaya penanggulangan

kemiskinan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang dapat mendekati keinginan kelompok-kelompok masyarakat yang didera oleh kemiskinan.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 jo Nomor 8 Tahun 2002 jo Nomor 34 Tahun 2002, Pemerintah telah membentuk Komisi Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dengan tugas melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan, yaitu pemerintah pusat dan daerah, wakil-wakil dari badan legeslatif, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, KPK telah berhasil merumuskan Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan (DISPK), yang antara lain menetapkan pendekatan utama penanggulangan kemiskinan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*Pro-Por Development Policy*), yaitu dengan mengurangi beban biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi serta meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan produktivitas untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik.

Dalam DISPK tersebut dicantumkan empat langkah kebijakan, yaitu : (1) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin; (2) Pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat memperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya, (3) Peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat miskin agar mampu bekerja dan berusaha dengan produktif; serta (4) Perlindungan sosial yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat miskin khususnya kelompok masyarakat paling miskin, yaitu fakir miskin, orang jompo, orang cacat, dan anak terlantar, serta kelompok masyarakat miskin yang tertimpa musibah bencana alam, konflik sosial dan dampak negatif krisis ekonomi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat multidemensi, yaitu kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi karena pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga dari segi pendidikan, ketenagakerjaan, ketidakberdayaan, perlindungan sosial, kesehatan, ketimpangan jender, ketata pemerintahan dan lingkungan. Oleh sebab masalah kemiskinan hanya dapat diselesaikan melalui usaha multidisipliner dan menghendaki keikutsertaan semua pihak, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan telah diberlakukannya otonomi daerah, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan menerapkan kebijakan pemerintah

daerah yang berpihak kepada masyarakat miskin serta harus mencerminkan pengakuan adanya perbedaan yang fundamental di daerah bersangkutan

2. Pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat dalam Meningkatkan minat dan budaya baca

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 mempublikasikan, membaca bagi masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi. Masyarakat Indonesia lebih memilih menonton televisi (85,9%) dan mendengarkan radio (40,3%) ketimbang membaca (23,5%). Artinya membaca untuk mendapatkan informasi baru dilakukan oleh 23,5% dari total penduduk Indonesia. Masyarakat lebih suka mendapatkan informasi dari televisi dan radio ketimbang membaca. Dengan data ini menunjukkan bahwa membaca belum menjadi prioritas utama masyarakat Indonesia

Implikasi dari rendahnya minat baca masyarakat terlihat dari kualitas pendidikan pendidikan di Indonesia yang belakangan ini jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Melihat dari survei *Times Higher Education Supplement (THES)* 2006, perguruan tinggi Indonesia baru bisa menempati deretan 250 yang diwakili oleh Universitas Indonesia, kualitas ini berada di bawah prestasi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) yang menempati urutan 185. Kemudian pada tahun 2007 menurut survei THES dari 3000 universitas di dunia, ITB baru berhasil berada pada urutan 927 dan sekaligus menjadi perguruan tinggi top di Indonesia.

Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia berarti menunjukkan pula rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Itu terbukti dari minimnya bangsa Indonesia dalam melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang berdaya saing. Usaha untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas berawal dari sumber daya manusia yang mempunyai ilmu dan mampu menyerap setiap informasi yang berkembang. Itu semua diperoleh melalui membaca. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, juga turut dalam memperpanjang angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2007 di Indonesia orang miskin berjumlah 37,17 juta orang atau 16,58%, pada bulan September 2012 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen) dari jumlah penduduk seluruhnya sekitar 245,197 juta orang. Meskipun terjadi penurunan namun jumlah penduduk miskin masih tergolong relatif besar. Merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, maka jumlah orang miskin di Indonesia hampir 50% dari jumlah penduduk. Tidak kalah

pentingnya, rendahnya sumber daya manusia terlihat dari angka pengangguran yang berjumlah 10,854,254 (tahun 2006)

Dari hasil survei UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah negara Indonesia (“Minat Baca Masyarakat Indonesia Paling Rendah di ASEAN”, *Warta Online*, 26 Januari 2011). Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001, artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45 (“Galakkan Baca Buku untuk Kemajuan Bangsa”, *Media Indonesia*, 17 Mei 2010).

Menurunnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa. Selain itu, maraknya media elektronik (televisi dan internet) yang kebanyakan berisi tayangan hiburan, pornografi, iklan komersial, dan hal-hal hedonistis lainnya menjauhkan masyarakat dari budaya membaca. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Kondisi ekonomi menyebabkan akses masyarakat terhadap buku-buku bermutu semakin sulit, karena untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari sudah kesulitan, apalagi membeli koran, buku, atau bacaan lainnya. Komitmen pemerintah menyediakan buku dan bahan bacaan yang berkualitas dan murah, perpustakaan umum, juga masih rendah.

Disamping itu rendahnya minat baca juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : (1) Kebiasaan yang didominasi budaya mendengarkan atau tutur. Kebiasaan yang merupakan budaya warisan menjadi kebiasaan dan menjadi penghalang utama untuk meningkatkan kebiasaan membaca dari generasi ke generasi. Singkatnya, pada saat ini masyarakat masih bergantung informasi dari mulut kemulut dan bukan bahan tertulis. Hal tersebut dipertegas oleh Venayaksa (2014) bahwa Indonesia secara umum bisa dikatakan memegang estafet kebudayaan lisan/ tutur. Hal ini bisa dilihat pada produk-produk budaya tradisi yang ada. Hingga saat ini masyarakat tidak terbiasa memasok bacaan apa lagi tulisan di dalam ruang lingkup keseharian. Imbas dari hal ini pada akhirnya membuat perangkat berpikir masyarakat menjadi lemah dan rentan untuk lupa. “Mendengar/ menyimak” adalah satu dari empat keterampilan berbahasa yang pasif, karena keterampilan berbahasa ini hanya merespon terhadap orang yang “berbicara.” Menyimak dan berbicara merupakan dua keterampilan berbahasa dalam budaya lisan. Sementara budaya literat (yang diharapkan) adalah yang lebih

mementingkan dua keterampilan berbahasa selanjutnya yaitu “membaca” dan “menulis”. Dalam proses membaca, seseorang tak hanya mengaktifkan mata sebagai media, tapi juga pikiran, karena keterbacaan akan benar-benar disebut demikian jika pikiran seseorang aktif. Sementara itu “menulis” juga layak dijadikan sebagai syarat mutlak budaya literat karena proses ini akan menuntut kemahiran yang sistematis. Jika semua merindukan sebuah komunitas sosial yang melek huruf (mau baca) secara alamiah, maka tak bisa mengesampingkan keterampilan menulis, (2) Pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat yang didalamnya terdapat taman bacaan masyarakat yang berfungsi menampung aspirasi dan minat baca yang menyangkut sumber daya, keuangan dan bahan bacaan belum tersedia dengan memadai, (3) Terdapat media tandingan terutama televisi yang menyajikan program yang ditata berbasis pada penataan media jarum hipodermis, dimana penonton tanpa reserve tunduk pada tampilan yang disuguhkan dengan sedikit sekali nilai nalar yang dipergunakan terutama untuk sesi iklan.

Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak dini sebagai salah satu upaya penanaman rasa senang membaca pada diri individu. (<http://sariberitacoco.blogspot.com/2012/08/minat-baca-masyarakat-indonesia-rendah.html#sthash.NZywftOi.dpuf>.)

Untuk mendongkrak minat baca pada masyarakat miskin sebagai bentuk tindak lanjut dan pemeliharaan pembelajaran yang berkelanjutan dibutuhkan dukungan tokoh masyarakat, masyarakat secara umum termasuk dalam hal ini keluarga dan lembaga yang akan mendukung kinerja perpustakaan dan rumah baca lain yaitu Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Dalam Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan TBM Tahun 2012 disebutkan bahwa TBM (Taman Bacaan Masyarakat) adalah lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan, berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multi media lain, yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.

Kegiatan Perluasan dan Penguatan TBM merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan keaksaraan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan

masyarakat yang memenuhi persyaratan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan Perluasan dan Penguatan TBM. Pemberian bantuan TBM dimaksudkan untuk memperluas dan memperkuat kelembagaan TBM, dan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan di bidang bahan bacaan dan pelaksanaan kegiatan literasi kepada masyarakat dengan: (1) Memperkaya variasi koleksi bahan bacaan, (2) Menyediakan tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan, (3) Menyediakan sarana pendukung yang memadai, dan (4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembudayaan kegemaran membaca (literasi) sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, (5) Menggali produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah yang memungkinkan untuk diberdayakan secara komersial oleh masyarakat

Tujuan Penyelenggaraan TBM dimaksudkan untuk menyediakan akses sarana pembelajaran yang menyediakan dan memberi layanan bahan bacaan yang merata, meluas, dan terjangkau oleh masyarakat dengan mudah dan murah. Adapun tujuannya adalah: (1) Meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca, (2) Menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca, (3) Membangun masyarakat membaca dan belajar, (4) Mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, (5) Mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya maju, dan beradab.

Fungsi yang melekat pada TBM adalah sebagai (1) sumber belajar, (2) sumber informasi, dan (3) sarana rekreasi-edukasi. Sebagai sumber belajar- TBM dengan menyediakan bahan bacaan utamanya buku merupakan sumber belajar yang dapat mendukung masyarakat pembelajar sepanjang hayat, seperti buku pengetahuan untuk membuka wawasan, juga berbagai keterampilan praktis yang bisa dipraktikkan setelah membaca, misal praktek memasak, budidaya ikan, menanam cabe dan lainnya. Sebagai sumber informasi- TBM dengan menyediakan bahan bacaan berupa koran, tabloid, referensi, booklet-leaflet, dan/atau akses internet dapat dipergunakan masyarakat untuk mencari berbagai informasi. Sebagai tempat rekreasi-edukasi- dengan buku-buku nonfiksi yang disediakan memberikan hiburan yang mendidik dan menyenangkan. Lebih jauh dari itu, TBM dengan bahan bacaan yang disediakan mampu membawa masyarakat lebih dewasa dalam berperilaku, bergaul di masyarakat lingkungan.

Hasil yang diharapkan dari pemberian bantuan TBM ini adalah:(1) Memperluas akses TBM sampai tingkat kecamatan, (2) Meningkatnya mutu perlengkapan dan peralatan sebagai sarana kelembagaan TBM, (3) Meningkatnya jumlah koleksi dan variasi judul bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (4) Meningkatnya minat dan

kegemaran membaca masyarakat, (5) Meningkatnya kegiatan pembudayaan kegemaran membaca, (6) Adanya produk unggulan sesuai dengan potensi lokal yang dapat dikembangkan dan diberdayakan oleh masyarakat secara ekonomi.

Dari tujuan dan fungsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya TBM, diharapkan masyarakat terutama pada daerah yang miskin dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam segala bidang dan mampu mengali produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Dengan peningkatkan pengetahuan dan keterampilan, maka sumberdaya manusia pada daerah miskin diharapkan mampu bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan pada akhirnya dapat berubah dari masyarakat pra sejahtera (miskin) menjadi masyarakat sejahtera yang ada di daerah

Layanan yang dapat diberikan TBM adalah: (1) Layanan taman bacaan masyarakat secara elektronik meliputi antara lain: (a) layanan bahan bacaan (buku, majalah, surat kabar/koran) digital, (b) layanan informasi secara elektronik baik melalui media terkemas maupun dunia maya. Layanan taman bacaan secara elektronik diharapkan mendorong: terwujudnya masyarakat yang berkeaksaraan media, teknologi dan informasi; tumbuhnya masyarakat yang gemar dan berbudaya baca secara berkelanjutan; memasyarakatkan budaya membaca pada masyarakat, mengkritisi setiap informasi yang diterima melalui bahan bacaan digital (elektronik) maupun dunia maya; (2) Membaca ditempat, dengan menyediakan ruangan yang nyaman dan didukung dengan variasi bahan bacaan bermutu, sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Untuk dapat menyediakan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan perlu berupaya untuk menemukenali minat dan karakteristik pengunjung, (3) Meminjamkan buku, artinya buku dapat dibawa pulang untuk dibaca dirumah, dan dalam waktu tertentu dan peminjam wajib mengembalikan buku, (4) Pembelajaran, dengan menggunakan berbagai pendekatan, misalnya: (a) Membimbing teknik membaca cepat (scanning dan skimming), (b) Menemukan kalimat dan kata kunci dari bacaan, (c) Belajar efektif, (5) Praktek keterampilan, Dengan buku keterampilan yang ada, masyarakat/pengunjung diajak untuk mempraktekkan bersama, seperti: praktek memasak, (6) Kegiatan Literasi. Melaksanakan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermanfaat, seperti: bedah buku, diskusi isu yang sedang berkembang, temu penulis, belajar menulis cerpen, (7) Melaksanakan lomba-lomba, misalnya lomba kemampuan membaca (menceriterakan kembali buku yang telah dibaca), cerdascermat dan lain-lain

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, TBM harus didukung oleh sumber daya untuk menjamin eksistensi dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik dan bermutu. Secara kelembagaan, sumber daya TBM meliputi: sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. (1) *Sumber Daya Fisik*. Sumber daya fisik TBM dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: sumber daya fisik utama, dan sumber daya fisik pendukung. Sumber daya fisik utama, adalah bahan bacaan. yaitu: semua jenis bahan bacaan dalam pelbagai bentuk media seperti: buku, majalah, tabloid, koran, CD dan lainnya. Perlu disadari bahwa bahan bacaan yang disediakan tiada lain untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat sebagai kelompok sasaran perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, oleh karenanya penentuan bahan bacaan yang harus disediakan perlu memperhatikan : karakteristik masyarakat, kebutuhan nyata masyarakat, kemampuan baca masyarakat, dan sesuai dengan potensi lokal. Sumber daya pendukung, adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan TBM, antara lain: rak/almari buku, display buku baru, rak majalah, gantungan koran, meja kerja, perangkat peralatan elektronik yang relevan merupakan salah satu komponen penting terwujudnya layanan taman bacaan masyarakat secara elektronik. Perangkat tersebut sekurangnya meliputi (a) komputer personal atau komputer jinjing, (b) Kamera Digital (c) fasilitas modem internal/eksternal (mobile/ ADSL), (d) alat pencetak (printer), (e) televisi, Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (f) alat pemutar video digital (DVD Palyer), (g) Pencadangan Sumberdaya Listrik (UPS), Almari penyimpanan dan fasilitas lain untuk membaca seperti: meja baca/bangku, alas duduk (tikar/kapet) dan kaca mata baca perlu juga disediakan, (2) *Sumber Daya Manusia*. Faktor utama dalam pengelolaan TBM adalah orang sebagai sumber daya manusia, sekurang-kurangnya terdapat 3 orang yang duduk dalam susunan organisasi yang melaksanakan pengelolaan TBM, terdiri atas: 1 orang Ketua, 1 orang yang mengurus administrasi dan teknis pemeliharaan, dan 1 orang memberikan layanan kepada masyarakat. (3) *Sumberdaya finansial*. Meskipun pemerintah memberikan bantuan pada TBM, namun pihak pengelola PBM harus kreatif untuk menggali dana dari berbagai sumber baik dari masyarakat, sponsor, membuat usaha-usaha atau kegiatan ekonomi (kewirausahaan) maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat miskin.

Perlu dipahami bahwa masyarakat Indonesia belum menyadari betapa pentingnya kegiatan membaca, mengajak untuk membiasakan membaca bukan sekedar menyediakan TBM dengan segala macam bahan bacaan yang disediakan. Tetapi perlu melakukan berbagai

upaya untuk mendorong masyarakat mau dan mampu membaca dengan berbagai kiat berikut:

(1) Mengenali masyarakat dan berbagai kebutuhannya, Agar dapat mengajak masyarakat mau membaca di TBM, perlu mengenal lebih dahulu masyarakat di sekitar TBM sebagai sasarannya. Dengan maksud untuk mengetahui sosial–budaya-ekonomi, agama, potensi lingkungan, latar belakang pendidikan, serta kebutuhan nyata yang diperlukan. Hal ini penting sekali sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, juga penting dalam penyediaan koleksi bahan-bahan bacaan yang akan disediakan,

(2) Melakukan sosialisasi TBM dan memberi kesadaran arti pentingnya kepada masyarakat TBM sebagaimana perpustakaan, memberikan layanan di bidang bahan bacaan kepada masyarakat, dengan jumlah bahan bacaan yang terbatas baik jumlah maupun jenisnya perlu dioptimalkan pemanfaatannya dengan cara mengenalkan TBM kepada masyarakat melalui sosialisasi keberadaan TBM, dan sekaligus memberi kesadaran terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan membaca,

(3) Membentuk kelompok sasaran berdasarkan kemampuan baca/kebutuhan. Membentuk kelompok sasaran berdasarkan kemampuan baca/kebutuhan dengan maksud untuk mempermudah melakukan pendekatan dan bimbingan. Seperti membentuk kelompok sasaran: (a) Pelajar, (b) Mahasiswa, (c) Petani/Nelayan, (d) Pedagang/Wiraswasta; (e) Religius, dan (f) pegawai/karyawan.

(4) Membimbing dan meningkatkan kemampuan baca kelompok sasaran, Salah satu faktor penyebab masyarakat Indonesia belum berbudaya baca antara lain kemampuan membaca yang rendah. Kemampuan membaca dalam arti memahami isi bacaan, menginterpretasikan bacaan, atau mengkombinasikan bacaan satu dengan yang lain. Sebuah studi yang dilakukan oleh *The International for The Evaluation of Education Achievement (IEA)* tahun 1992 terhadap 30 negara termasuk Indonesia, menyimpulkan bahwa kemampuan anak-anak Indonesia menduduki rangking 29. Dengan rendahnya kemampuan membaca ini mengakibatkan orang malas untuk melakukan aktivitas membaca. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelola TBM perlu sekali meningkatkan kemampuan membaca dengan cara membimbing dan mengajarkan teknik membaca yang efektif dan efisien.

(5) Menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat, Agar TBM dapat melakukan tugas dan fungsinya, pengelola dituntut untuk kreatif menciptakan kegiatan sebagai upaya untuk menarik masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan TBM. TBM berfungsi sebagai sarana pembelajaran, sumber informasi, dan rekreasi-edukatif, bahan bacaan apapun jenisnya

dapat menjadi penunjang dalam pembelajaran. Praktek keterampilan dari buku-buku yang tersedia di TBM dengan cara pengelola mencarikan nara sumber teknis di bidang keterampilan tertentu misalnya membuat sampho, sabun cuci, kecap, atau minyak kelapa dengan cara demo. Demo membuat sabun cuci ini akan memotivasi masyarakat untuk membaca penjelasan lengkap melalui buku. Beberapa contoh kegiatan yang bisa dipadukan dengan bahan bacaan adalah: (a) Mempraktekan isi buku (keterampilan), seperti praktek memasak, budi daya ikan, dan bercocok tanam, (b) Mendiskusikan isi buku baru, (c) Lomba-lomba, seperti lomba menulis sinopsis, lomba memasak dan mengadakan acara cerdas cermat. Lomba menulis sinopsis, caranya peserta lomba disuruh untuk mengambil satu buku yang ada dan membaca pada waktu tertentu. Selanjutnya diminta untuk membuat sinopsis dari buku yang dibaca tersebut. Sinopsis sederhana tidak perlu terlalu panjang tetapi disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan masyarakat. Lomba ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang baru melek huruf karena tidak saja melatih keterampilan membaca tetapi juga menulis sehingga akan menjaga ketarmpilan yang sudah diperolehnya tidak akan hilang/lupa. Lomba memasak, caranya peserta lomba diminta untuk membaca resep masakan, selanjutnya diminta untuk mempraktekan sesuai dengan resep yang telah dibaca. Memasak dengan bahan sederhana yang mudah diperoleh di lingkungan masyarakat setempat. Kegiatan ini baik juga bila melibatkan PKK. Mengadakan acara cerdas cermat dengan pertanyaan seputar buku yang sudah disediakan oleh TBM. Acara cerdas cermat ini bisa diadakan sebulan sekali bergantung keperluan dan respon masyarakat. Acara ini akan menumbuhkan rasa bersaing dalam kegiatan membaca di masing-masing kelompok peserta. Tentu saja diusahakan ada hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba sebagai daya tarik. Hadiah bisa dicarikan dengan mencari donatur atau sponsor. Untuk kegiatan ini, pihak pengelola harus merangkul berbagai pihak atau organisasi kemasyarakatan, seperti PKK, Karang Taruna, Organisasi keagamaan dan lain-lain.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa kehadiran TBM sangat dibutuhkan masyarakat miskin karena dapat memberi kesempatan kepada mereka memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta harapan dalam meningkatkan taraf kehidupan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan jika dikelola dengan baik, akan menjadikan mereka sebagai sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif yang mampu bersaing di lapangan pekerjaan. Disamping itu keunggulan kompetitif tersebut membuka peluang bagi mereka untuk dapat memasuki dunia kewirausahaan terutama dalam mengelola produk unggulan pada daerah masing-masing. Dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak diharapkan masyarakat pada daerah miskin dapat berwirausaha yang pada

akhirnya mereka dapat memiliki pendapatan yang tetap dan tidak lagi menjadi pengangguran.

Oleh sebab itu kehadiran TBM hendaknya tetap dapat dipertahankan dan diusahakan dapat berkembang pada masa mendatang menjadi sebuah organisasi yang sehat dan dinamis. Sehat dalam pengertian semua komponen dalam TBM berfungsi optimal, sedangkan pengertian dinamis mengandung arti TBM terbuka terhadap semua perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Melalui kerjasama sinergis dengan semua pihak, TBM diharapkan dapat berperan dalam mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga mereka tidak lagi berada dalam posisi sebagai masyarakat pra sejahtera tetapi berubah sebagai masyarakat sejahtera.

PENUTUP

Dengan adanya Taman Bacaan Masyarakat, diharapkan terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakat miskin dimana membaca dijadikan sebagai kebutuhan yang membawa pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Untuk mewujudkan hal tersebut pengelola TBM harus bisa mengenali masyarakat dengan maksud untuk mengetahui kondisi sosial-budaya-ekonomi, agama, potensi lingkungan, latar belakang pendidikan, serta kebutuhan nyata yang diperlukan. Disamping itu perlu juga dilakukan sosialisasi TBM dan bimbingan secara terus menerus dan memberi kesadaran tentang arti pentingnya TBM dengan membentuk kelompok sasaran berdasarkan kemampuan baca/kebutuhan. Agar kegiatan TBM diminati masyarakat maka untuk meningkatkan kegairahan masyarakat berkunjung ke TBM, pengelola TBM hendaknya juga menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat seperti mempraktekan isi buku (keterampilan), seperti praktek memasak, budi daya ikan, dan bercocok tanam; mendiskusikan isi buku baru; lomba-lomba, seperti lomba menulis sinopsis, lomba memasak dan mengadakan acara cerdas cermat.

Dan yang tidak kalah pentingnya, pengelola TBM hendaknya juga melibatkan dan merangkul organisasi yang ada dimasyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Organisasi keagamaan dan lain-lain agar kehadiran organisasi-organisasi tersebut dapat memberikan dukungan dan menjadi pilar bagi TBM sehingga tujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterahkan masyarakat miskin bisa diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, Wayan. *Peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam Seminar Nasional : Kemiskinan di Indonesia dan Peran Lembaga Pendidikan dalam Pengendaliannya*. Malang : Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 16-17 November 1993.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012* Berita Resmi Statistik. No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013
- Dillon, HS, dan Hermanto. *Kemiskinan di Negara Berkembang*. Prisma, XII (12) : 1993.
- Erwidodo. *Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan*. Prisma. No.3 tahun XII (12) : 1993
- Esmara, Hendra. 1986 . *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Hadiwigeno, Soetanto. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia*. Prisma. III (3) : 1993,P.28.
- Haz, H. Hamzah. 2001. *Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia : Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial*. Jakarta : Pustaka Ciganjur
- Minat baca dan Kemiskinan. http://id.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A2oKm MyjKBNT8R0AKdv3RQx.?p=minat+baca+dan+++kemiskinan&pvid=OaGI4j EwNi6SrDRIUr7D_QxcMjAyLIMTKIn_tw1Y&rd=r1&type=irmsd0101_ne&fr2=sb-top&hsimp=yhs-fullyhosted_003&hspart=ironsource&xargs=0&b=11. Diakses 20 Maret 2014.
- Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Indonesia. 2012. *Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.2012
- Minat Baca dan Revitalisasi Perpustakaan*. <http://www.pemustaka.com/minat-baca-dan-revitalisasi-perpustakaan.html>. Diakses 20 Maret 2014
- Santoso, Kabul. *Kemiskinan : Reorientasi Strategi dan Pengendaliannya*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Niaga/Ekonomi Pertanian Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Diucapkan pada Rapat Terbuka Senat Universitas Jember Tanggal 5 Agustus 1992 di Jember
- Soerjani, Moh. 1987. *Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta : UI Press
- Suparlan, Supardi .1984. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Sinar Agape Press
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh Jilid 1* . Jakarta : Erlangga
- Salim, Emil. 1989. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Yayasan Idayu

- Sumardi, Mulyanto .1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta : Rajawali
- Syamsi, Ibnu.1982. *Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan Pemrograman dan Pengajaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta : Inti Idayu Pers.
- Venayaksa , Firman . *Taman Bacaan Masyarakat: Masyarakat Membaca, Membaca Masyarakat* <http://www.firmanvenayaksa.com/2011/01/taman-bacaan-masyarakat-masyarakat.html>. Diakses 20 Maret 2014